

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU DI KOTA TANJUNGPINANG

ASMA NUR PATULLAH

ABSTRAK

Penerapan bangunan berciri khas Melayu pada bangunan publik merupakan ketetapan yang telah diatur didalam peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu. Peraturan ini dibuat dalam tujuan untuk menjaga dan maerawat kebudayaan melayu serta melestarikan kebudayaan melayu melalui bangunan-bangunan publik yang ada di instansi pemerintahan. Namun sejak diberlakukannya peraturan tersebut, masih banyak bangunan publik dipemerintahan yang tidak menerapkan dciri khas melayu pada bangunannya. Untuk mendukung memperoleh hasil didalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang Proses Penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk memudahkan peneliti menguraikan hasil temuan peneliti berdasarkan observasi dan teknik pengumpulan data oleh peneliti dilapangan. Melalui tahap pengumpulan data dilapangan serta penguatan penelitian oleh peneliti dengan metoode serta teori yang digunakan, maka didapati hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Noomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan banyaknya bangunan pemerintahan ayng belum menerapkan ciri khas melayu baik pada bangunan maupun penggunaan corak dan unsur budaya Melayu. Selain itu juga kurang tegasnya pemerintah provinsi didalam penegakan peraturan tersebut kepada seluruh instansi pemerintahan, sehingga peraturan ini masih belum dapat dijalankan secara baik.

Kata kunci: Impelemntasi, Penegakan Hukum, Bangunan Berciri Khas Melayu, Provinsi Kepulauan Riau

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE RIAU
ISLANDS PROVINCE ON BUILDING SPECIFICALLY MELAY IN
TANJUNGPINANG CITY**

ASMA NUR PATULLAH

ABSTRACT

The application of buildings with Malay characteristics in public buildings is a provision that has been regulated in the regional regulation of the Riau Islands province number 1 of 2019 concerning Typical Malay Bericri Buildings. This regulation was made with the aim of maintaining and caring for Malay culture and preserving Malay culture through public buildings in government agencies. However, since the enactment of the regulation, there are still many public buildings in the government that do not apply Malay characteristics to their buildings. To support obtaining the results in this study, the researcher used the theory proposed by Soerjono Soekanto about the legal suppression process. This study uses a sociological juridical method to facilitate researchers in describing the findings of researchers based on observations and data collection techniques by researchers in the field. Through the stage of collecting data in the field and strengthening research by researchers with the methods and theories used, it was found that the results of research regarding the Implementation of the Regional Regulation of the Riau Islands Province Noomor 1 of 2019 concerning Buildings with Malay Characteristics have not gone well. This is because there are many government buildings that have not implemented Malay characteristics both in buildings and the use of Malay cultural styles and elements. In addition, the provincial government is also less strict in enforcing these regulations to all government agencies, so that these regulations still cannot be implemented properly.

Keywords: Implementation, Law Enforcement, Typical Malay Building , Riau Islands Province